

Optimalisasi Penghapusan Material Satker Akademi TNI Angkatan Laut Guna Tertib Administrasi pada Laporan Simak BMN

Optimization Of Material Disposal At The Naval Academy Work Unit For Administrative Order In Simak Bmn Reporting

Mekahtul Rahman¹, Mochamad Nurudin^{2*}, Umi Salamah³
^{1,2,3} Akademi Angkatan Laut, Indonesia

Alamat: Jl. Bumimoro Morokrembangan, Surabaya, Jawa Timur, 60178, Indonesia

*Korespondensi: mochamadnurudin@akademitnial.ac.id

Abstract: State-owned goods (BMN) that have been acquired must undergo proper management, which includes a series of activities such as bookkeeping, inventorying, and reporting of BMN by legal provisions. This is based on the Indonesian Minister of Finance Regulation No. 181/PMK.06/2016, Article 1, concerning the management of BMN. Optimization, in this context, refers to the goal of improving or refining existing performance to make it better than before. Therefore, the optimization of asset disposal at the AAL (Naval Academy) work unit must be implemented to ensure proper data management in Simak BMN. Over time, the value of these assets will depreciate annually, leading to the eventual disposal of BMN when they no longer hold any value or function and only incur maintenance costs compared to acquiring new BMN. At the Naval Academy, there is still a deficiency in the disposal of BMN that should have been removed from the BMN list, primarily due to insufficient coordination between work units, which results in poor reporting in the SIMAK BMN system. The researcher focuses on the Naval Academy in conducting this study within the work units in the AAL environment. This study is a qualitative descriptive research, utilizing data collection methods such as observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that: 1) The disposal process at the Naval Academy work unit has not been carried out effectively. 2) There are still BMNs that have not been removed from the BMN list but should have been. 3) There is a lack of personnel knowledge in each work unit regarding asset disposal, disrupting the reporting process in Simak BMN.

Keywords: optimization, disposal, Simak BMN

Abstrak: Barang Milik Negara yang telah diperoleh harus dilaksanakan penata usahaannya yaitu meliputi rangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 181/PMK.06/2016 pasal 1 tentang penatausahaan BMN. Optimalisasi sendiri merupakan suatu tujuan untuk memperbaiki ataupun menyempurnakan suatu kinerja yang ada menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Dengan begitu optimalisasi Penghapusan di satker AAL harus dijalankan agar tertibnya dalam pendataan Simak BMN. Dalam penggunaannya seiring waktu akan mengalami penyusutan nilai setiap tahunnya, hingga akhirnya nanti akan dilaksanakan penghapusan pada BMN tersebut karena sudah tidak memiliki nilai lagi atau fungsi dan guna nya sudah tidak baik lagi dan hanya membebani biaya perawatan dibandingkan dengan pengadaan BMN yang baru lagi. Akademi Angkatan Laut sendiri masih terdapat kekurangan pada penghapusan pada BMN yang sudah seharusnya di hapus dari daftar BMN, dikarenakan koordinasi antar satker yang masih belum terjalin baik sehingga menyebabkan kurang tertibnya pelaporannya pada SIMAK BMN. Peneliti mengambil ruang lingkup di Akademi TNI Angkatan Laut dalam pelaksanaannya pada satuan kerja yang ada di lingkungan AAL. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses Penghapusan di Satker Akademi TNI Angkatan Laut belum berjalan cukup baik. 2) Masih adanya BMN yang belum dihapus dari daftar BMN namun seharusnya dihapus. 3) Kurangnya pengetahuan personil tiap Satker terhadap penghapusan sehingga mengganggu jalannya pelaporan pada Simak BMN.

Kata Kunci: optimalisasi, penghapusan, Simak BMN

1. PENDAHULUAN

Akademi TNI Angkatan Laut merupakan suatu instansi atau Satuan Kerja (Satker) dan merupakan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) yang mempunyai fungsi pembinaan personel yang mencetak Perwira di TNI AL dengan masa pendidikan selama 3,5 tahun di Akademi Angkatan Laut dan memiliki Komando langsung kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Fasilitas Akademi TNI Angkatan Laut yang terdapat pada Prodi baik berupa gedung atau ruangan untuk menunjang pembelajaran dan pengasuhan bagi Taruna, seperti gedung Candrasa tempat penginapan atau mess bagi Taruna. Dengan bertambahnya masa atau usia dari struktur bangunan yang ada di Akademi TNI Angkatan Laut baik material dan bangunannya yang ada di lingkungan Akademi TNI Angkatan Laut dan telah mengalami banyak renovasi dan perubahan tata ruang yang ada pada tiap Satker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 181/PMK.06/2016 pasal 1 tentang penatausahaan BMN, Barang Milik Negara yang telah diperoleh harus dilaksanakan penatausahaannya yaitu meliputi rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BMN yang selalu mengalami penambahan atau pengurangan nilai dicatat dalam sebuah aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN). Dalam hal ini ada juga hal-hal lain yang menyebabkan BMN harus dihapus dari daftar BMN seperti terbakar, hilang, terkena bencana alam dan mengalami rusak berat karena kecelakaan.

Berkaitan dengan pengadaan dan dukungan material pada tiap Satker yang ada di lingkungan Akademi Angkatan Laut, Direktorat yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Ditlog (Direktorat Logistik AAL) untuk mendistribusikan dan mengawasi jalannya penggunaan Barang Milik Negara di Akademi TNI Angkatan Laut. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang memiliki tugas dan tanggung jawab dengan wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang berada dalam pengawasannya dengan sebaik-baiknya. Pengadaan material baru dicatat sebagai barang masuk dalam daftar Barang Milik Negara dalam laporan Simak BMN, namun ada juga material-material yang telah mengalami penyusutan nilai dalam hal ini kondisinya sudah tidak dapat digunakan lagi atau dalam keadaan rusak berat dan harus segera di hapus dari daftar Barang Milik Negara. Namun ada material tersebut yang tidak bisa digunakan dan hanya ditumpuk atau dibiarkan begitu saja di dalam gudang sehingga material tersebut tidak dapat digunakan lagi dan hanya mempersempit tata ruang yang ada, lalu hanya

membebani anggaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dalam biaya perawatan bagi material yang telah mengalami rusak berat namun diperpanjang usianya, yang seharusnya dapat dibeli untuk Barang Milik Negara yang baru yang memiliki fungsi yang lebih unggul dan mengikuti perkembangan zaman.

Penelitian ini disusun dengan adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses penghapusan yang ada di satker Akademi TNI Angkatan Laut yang dapat diidentifikasi diantaranya : 1) Terdapat barang atau material yang telah mengalami penyusutan nilai belum dilaksanakan proses penghapusan terhadap BMN. 2) Personel yang ada pada tiap Sub satker di Akademi TNI Angkatan Laut masih belum optimal dalam memahami prosedur dan tata cara penghapusan BMN. 3) Adanya perencanaan yang belum matang antar satker dalam proses penghapusan BMN sehingga terjadi keterlambatan dalam proses penghapusan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendata setiap Satker yang ada di Akademi TNI Angkatan Laut supaya dapat melaksanakan penghapusan terhadap Barang Milik Negara secara optimal. 2) Untuk mengetahui apakah personil tiap satker sudah mengetahui prosedur dalam proses penghapusan Barang Milik Negara dengan baik dan benar. 3) Untuk mengetahui tiap Satker yang ada di Akademi TNI Angkatan Laut dapat merencanakan apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara secara optimal.

Adapun referensi dalam penelitian ini adalah sebuah penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Aset/Barang (Barang Milik Negara) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi (Etik Winarni, 2020). Pengelolaan aset yang baik akan berkontribusi besar bagi pemerintah daerah, sebaliknya jika pengelolaannya buruk maka akan berdampak buruk pula pada pemerintah daerah tersebut. Data yang dianalisis menggunakan Uji validitas dan reliabilitas untuk data kuesioner dan analisis Regresi Linear Berganda. Penelitian terdahulu yang ke dua berjudul Prosedur Dan Persyaratan Penghapusan Barang Bergerak Milik Negara/Daerah Yang Kadaluarsa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Afrianti, 2019). PP Nomor 27 Tahun 2014 mengatur Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, salah satu ketentuannya mengatur tentang Penghapusan. Penelitian ini berfokus membahas tentang penghapusan barang bergerak milik negara/daerah yang kadaluarsa dengan memuat rumusan masalah persyaratan penghapusan barang milik negara/daerah dan bagaimana prosedur dan persyaratan penghapusan barang bergerak milik negara/daerah tersebut dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan atau *library research*. Persyaratan penghapusan barang

bergerak milik negara/daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan teknis (secara fisik tidak dapat digunakan, kadaluarsa, modernisasi, perubahan karena spesifikasi dan berkurangnya berat barang tersebut), persyaratan ekonomis (lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh), dan apabila barang tersebut hilang. Dan penelitian terdahulu yang ke tiga berjudul Penyempurnaan Simak BMN melalui model operational Information System (OIS) Dalam Penghapusan Barang Milik Negara Pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember, (Anggoro, 2012). Simak BMN merupakan sistem yang dikeluarkan Departemen Keuangan untuk membantu inventarisasi Barang Milik Negara (BMN). Institut Teknologi Sepuluh November adalah instansi yang menggunakan sistem tersebut untuk membantu pengelolaan BMN. Sampai saat ini BMN tersebut belum terorganisasi dengan baik, terutama dalam kegiatan penghapusan. Penumpukan barang rusak masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metodologi studi kasus. Penelitian ini mencari penyelesaian atas kegiatan penghapusan yang belum terorganisasi dengan baik di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Melalui rancangan model *Operational Information System* (OIS) dalam penghapusan BMN diharapkan mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk membantu penyelesaian penumpukan barang yang rusak berat untuk dihapuskan. Penumpukan barang rusak terjadi karena inventarisasi yang masih manual, dengan Evaluasi terhadap kegiatan penghapusan BMN yang berjalan saat ini dengan menggunakan *Operational Information System* (OIS) yang mengintegrasikan inputan *Transaction Processing System*, *Operational Engineering Subsystem*, dan *Operational Intellegence Subsystem* dihasilkan *output* laporan usulan penghapusan BMN.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sifat kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Nana Syaodih, 2015:60). Peneliti mengumpulkan data dari informan yang ada di lingkungan Akademi TNI Angkatan Laut yang diperoleh secara langsung dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai optimalisasi

Penghapusan terhadap Barang Milik Negara yang memasuki kategori untuk dihapus dari daftar pengguna BMN maupun daftar BMN.

Menurut (Sugiyono, 2017:225) pengumpulan data dapat menggunakan sumber :

1) Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan memberikannya kepada pengumpul data. 2) Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data (Daniel, 2002). Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data.

Sementara, teknik pengumpulan data adalah suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu (Ulber Silalahi, 2011:280). Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1) Observasi. Melihat langsung ke lokasi penelitian yaitu Ditlog Akademi Angkatan Laut dalam melaksanakan proses penghapusan dan pendataan Barang Milik Negara dan administrasi pada laporan Simak BMN. Peneliti dapat melaksanakan observasi dan pengamatan serta pencatatan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dan perlu diteliti. 2) Wawancara. Dilakukan kepada informan dengan berdasarkan pedoman wawancara yang telah penulis buat atau persiapkan sebelumnya. 3) Dokumentasi. Merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber data tertulis, gambar, laporan, peraturan dan mencari dokumen berupa bujuk dan lain sebagainya agar penelitian lebih dipercaya. 4) Trianggulasi. Bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini, peneliti mengecek kredibilitas data melalui trianggulasi sumber yaitu memberikan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda. Ini dimaksudkan untuk melihat jawaban atau membandingkan jawaban dari informan untuk ditarik kesimpulan.

Menurut para ahli menyampaikan bahwa analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar” (Moleong, 2001;103). Definisi ini mengisyaratkan adanya gambaran tentang pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Selanjutnya ada langkah yang harus dilakukan dalam analisa data kualitatif yaitu pertama pengumpulan data (*data collection*), kedua reduksi data (*data reduction*), display data dan verifikasi dan

penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Peneliti melakukan beberapa tahapan dalam penyusunan penelitian yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :
1) Tahap perencanaan penelitian. Kegiatan tahap ini meliputi identifikasi masalah atau mencari permasalahan, mengadakan studi pendahuluan dan menentukan sampel penelitian. 2) Tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini meliputi pengumpulan data, analisis data dan laporan penelitian.

3. PEMBAHASAN

Peneliti melaksanakan wawancara kepada narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab dalam rangka mendukung data atau informasi yang dibutuhkan oleh penulis guna memecahkan permasalahan. Penulis melaksanakan pengumpulan data dari hasil wawancara dengan narasumber, melaksanakan observasi secara langsung di lapangan dan dokumentasi. Kemudian penulis menganalisis dan membuat kesimpulan.

Penyajian Data

Berikut daftar narasumber, daftar pertanyaan dan dokumentasi berupa foto-foto narasumber :

Tabel 1 Daftar Narasumber Wawancara Terstruktur

No	Nama	Pangkat, Korps, NRP	Jabatan
1.	Rudi Prasetyanto	Mayor Laut (T) 15810/P	Kasimaterial
2.	Aan Andriana, S.T	Kapten Laut (T) 19400/P	Kaurmaterial
3.	Imron Rosadi	Pelda TKU/100526	Operator Simak BMN

Tabel 2 Daftar Pertanyaan Wawancara Terstruktur

No	Pertanyaan
1.	Apa menurut anda proses Penghapusan material pada tiap satker di Akademi Angkatan Laut sudah berjalan optimal? <i>Jawaban</i> Narasumber 1 : Belum maksimal dikarenakan masih ada satker yang mempunyai BMN yang sudah waktunya PUS namun tidak turut serta mengusulkan barang/material tersebut ke ditlog AAL untuk dilaksanakan pengajuan permohonan proses penghapusan. Narasumber 2 : Belum, dari tiap-tiap satker terkadang belum menyertakan permohonan penghapusan. Narasumber 3 : Belum, untuk pelaksanaan penghapusan dari tiap satker belum berjalan optimal.
2.	Apakah menurut anda material yang sudah mengalami penyusutan nilai masih terdapat di Akademi TNI Angkatan Laut dan dipergunakan dalam menunjang

	<p>pembelajaran dan pengasuhan Taruna?</p> <p><i>Jawaban</i></p> <p>Narasumber 1 : Jenis material yang dipergunakan untuk pembelajaran/ pengasuhan taruna tentunya harus dilihat dari aspek kelaikan dari materialnya tersebut, seberapa tingkat penyusutannya kalau barang tersebut sudah berkurang nilainya namun masih laik pakai dan ada toleransi untuk dipergunakan maka masih tetap bisa digunakan tetapi kalau sudah tidak memenuhi kelaikan untuk dipergunakan pembelajaran Taruna maka material tersebut tidak dipergunakan lagi seperti halnya KAL Kadet dan Bridge Simulator.</p> <p>Narasumber 2 : Masih ada tetapi tidak terpakai untuk pembelajaran dan pengasuhan seperti KAL Kadet dan Bridge Simulator.</p> <p>Narasumber 3 : Masih ada dan masih dipergunakan untuk menunjang kegiatan Taruna.</p>
3.	<p>Apa permasalahan yang sering dihadapi satker AAL saat akan melaksanakan penghapusan BMN?</p> <p><i>Jawaban</i></p> <p>Narasumber 1 : Permasalahan yang timbul yang dihadapi oleh satker pada</p>
	<p>saat proses penghapusan BMN diantaranya usulan penghapusan lambat karena harus mengikuti alur/tahapan-tahapan berjenjang dalam proses PUS.</p> <p>Narasumber 2 : Terkadang sering didahulukan eksekusi barang mendahului proses.</p> <p>Narasumber 3 : Permasalahannya usulan berjalan lambat, karena saling menunggu koordinasi dengan pimpinan dan satker dibawahnya.</p>
4.	<p>Apakah menurut anda pengetahuan personil tiap satker akan prosedur penghapusan BMN sudah diketahui dengan baik?</p> <p><i>Jawaban</i></p> <p>Narasumber 1 : Belum dikarenakan untuk prosedur penghapusan BMN masih banyak personel yang belum memahami dengan baik tentang tatacara penghapusan BMN.</p> <p>Narasumber 2 : Belum dikarenakan tiap-tiap satker belum terdapat personil pengawak Simak BMN.</p> <p>Narasumber 3 : Belum semua personil paham tentang penghapusan contohnya barang yang mengalami penyusutan nilai langsung di buang tanpa melihat nilai penyusutannya sehingga laporan pada Simak BMN menjadi tidak tertib.</p>
5.	<p>Apa yang menjadi penghambat utama dalam proses penghapusan BMN dan laporannya pada Simak BMN di satker AAL?</p> <p><i>Jawaban</i></p> <p>Narasumber 1 : Yang menjadi penghambat antara lain keterbatasan personel di satker dan kurangnya koordinasi dengan satker terkait.</p> <p>Narasumber 2 : Yaitu proses pengajuan ke pusat sering menjadi kendala karena menunggu keputusan dari pimpinan secara bersamaan dengan kotama lain.</p>
	<p>Narasumber 3 : Yaitu keterbatasan personil pada pengawak SIMAK BMN pada satker AAL dan kurangnya koordinasi dengan tingkat atas seperti Slogal.</p>
6.	<p>Bagaimana cara mengatasi bila ada BMN yang hilang sedangkan barang tersebut belum di hapuskan?</p> <p><i>Jawaban</i></p> <p>Narasumber 1 : Kita melakukan penelusuran BMN berasal/perolehannya dari mana, kelengkapan sumber dokumen, dan berkoordinasi dengan satker terkait, setelah ketemu akan dicatat dan di data pada Simak BMN karena barang hilang tersebut adalah BMN dan harus tercatat.</p>

a	<p>Narasumber 2 : Melaksanakan pencarian terhadap BMN yang hilang, namun apabila tidak ditemukan juga, maka barang tersebut segera untuk diajukan penghapusan karena tidak ada wujudnya lagi, agar tidak terdata lagi dalam Simak BMN.</p> <p>Narasumber 3 : Melaksanakan penghapusan terhadap BMN tersebut agar tidak ada lagi dalam daftar BMN pada laporannya di Simak BMN.</p>
7.	<p>Apakah menurut anda pendataan pada laporan Simak BMN di Akademi Angkatan Laut sudah tertib administrasi?</p> <p><i>Jawaban</i></p> <p>Narasumber 1 : Sudah tertib walaupun masih terdapat ada beberapa kekurangan.</p> <p>Narasumber 2 : Sudah</p> <p>Narasumber 3 : Cukup tertib namun masih terdapat kekurangan.</p>
8.	<p>Bagaimana cara meningkatkan pelaporan pada Simak BMN agar penghapusan berjalan dengan baik dan tertib administrasi?</p> <p><i>Jawaban</i></p> <p>Narasumber 1 : Selalu berkoordinasi dengan instansi terkait saat penghapusan (Simak BMN, KPKNL, dan tingkat eselon dalam hal ini Slogal).</p> <p>Narasumber 2 : Seharusnya tiap-tiap satker selalu melaksanakan koordinasi dengan terencana terhadap pelaksanaan pendataan data inventaris terhadap BMN kepada Ditlog AAL.</p> <p>Narasumber 3 : Memonitor barang inventaris yang berupa BMN di satker masing-masing agar mengetahui barang tersebut baru diadakan, akan dihapus atau telah mengalami penyusutan, agar pelaporannya tertib pada Simak BMN.</p>
9.	<p>Menurut anda bagaimana perencanaan yang baik antar satker di Akademi Angkatan Laut agar tidak terjadi kesalahan dalam penghapusan BMN?</p> <p><i>Jawaban</i></p> <p>Narasumber 1 : Perlu adanya penekanan dari pimpinan dan perlu diadakan kursus penghapusan BMN perwakilan untuk tiap-tiap satker untuk pengawak SIMAK BMN.</p> <p>Narasumber 2 : Perlu diadakan penekanan dari pimpinan dan perlu ada kursus di masing-masing satker untuk pengawak Simak BMN.</p> <p>Narasumber 3 : Dengan membuat surat edaran ke tiap satker terhadap barang-barang yang telah mengalami penyusutan nilai.</p>



Gambar 1 Wawancara dengan narasumber 1



Gambar 2 Wawancara dengan narasumber 2



Gambar 3 Wawancara dengan narasumber 3

Analisa Data

Dari hasil wawancara dan observasi secara terstruktur yang telah dilakukan peneliti bahwa penghapusan material di satker Akademi TNI Angkatan Laut belum optimal dikarenakan :

- a. Proses penghapusan di tiap satker di Akademi TNI Angkatan Laut yaitu terjadinya keterlambatan dalam pengajuan proses penghapusan material yang akan di PUS, baik itu karena belum mengajukan permohonan PUS ke Ditlog AAL ataupun dikarenakan barang yang sudah seharusnya di PUS tidak disertakan dalam permohonan pengajuan untuk di PUS. Sehingga proses penghapusan menjadi tidak teratur dan terjadinya keterlambatan di prosesnya. Menurut narasumber yang merupakan Kasi Material di Ditlog Akademi TNI Angkatan Laut, bahwa prosesi penghapusan sering kali terjadi hal seperti mendahulukan eksekusi barang tanpa pelaksanaan penghapusan sesuai prosedur sehingga dapat mengganggu jalannya pendataan pada laporan Simak BMN. Lalu juga seringnya terjadi keterlambatan

dalam proses penghapusan suatu material dikarenakan koordinasi dengan satker tingkat atas yang terbilang lambat karena kebijakan pimpinan sehingga memakan waktu yang tidak sebentar.

- b. Operator Simak BMN pada Akademi TNI Angkatan Laut sudah kompeten dalam mengawaknya. Namun karena semua satker tidak berkoordinasi dengan baik terhadap materialnya masing-masing sehingga pendataan terhadap material yang ada menjadi cukup lama, seharusnya Ditlog AAL sebagai Simak BMN pusat dapat menerima pelaporan dengan baik dan relative waktu yang tidak terlalu lama. Simak BMN sendiri memiliki pengawak untuk pengoperasiannya.
- c. Akademi TNI Angkatan Laut memiliki banyak BMN yang telah lama dipakai atau telah mengalami penyusutan nilai bahkan tidak bisa digunakan lagi untuk pembelajaran dan pengasuhan Taruna dan seharusnya segera dihapuskan dari daftar BMN tetapi tetap digunakan walaupun sudah tidak optimal. BMN harus dicatat dalam sebuah aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN).

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisa dan sumber data yang telah di dapat dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi tentang penghapusan material pada satker yang ada di Akademi TNI Angkatan Laut guna tertib administrasi pada Laporan Simak BMN, maka yang diharapkan dari peneliti adalah :

- a. Proses penghapusan pada tiap satker Akademi TNI Angkatan Laut belum berjalan optimal dikarenakan terkendalanya dalam pengajuan material atau barang yang akan di hapus dari daftar BMN. Seperti Ditlog AAL yang menerima pengajuan penghapusan BMN dari tiap satker tapi dengan waktu yang relative lama. Lalu barang yang seharusnya sudah di PUS terkadang tidak diajukan dalam penghapusan sehingga barang tersebut masih tersimpan dan tidak di hapus dari daftar BMN walaupun sudah tidak dipergunakan lagi. Seperti hal nya juga terjadi eksekusi terlebih dahulu terhadap BMN yang sudah mengalami penyusutan nilai yang jauh tanpa mengikuti prosedur penghapusan sebagaimana peraturan yang berlaku, seperti kata Kasi Material Ditlog AAL. Peneliti mengharapkan dalam pelaksanaan penghapusan di lingkungan satker Akademi TNI Angkatan Laut harus dilaksanakan sesuai prosedur penghapusan jangan ada yang mendahului menghapus suatu material dengan mengeksekusi langsung seperti (membuang,

menghilangkan atau menghancurkan) material tersebut tanpa izin dari pengguna/kuasa pengguna barang dalam hal ini Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut, yang akhirnya akan menyebabkan tidak tertib nya administrasi dalam pelaporan Simak BMN.

- b. Kondisi Operator Simak BMN di Akademi TNI Angkatan Laut harus terus diadakan regenerasi, pelatihan atau kursus mengenai operator Simak BMN guna memperbanyak orang yang mendalami dalam pengawakan aplikasi ini, sehingga akan mempermudah dalam hal pengisian data dalam aplikasi pada tiap satker yang ada di lingkungan Akademi TNI Angkatan Laut. Dengan begitu Operator yang mengawaki Simak BMN dapat paham apa yang menjadi tugasnya sehingga akan mempermudah dalam hal koordinasi dalam pendataan BMN baik yang baru masuk ataupun yang akan dilaksanakan penghapusan dan dilaporkan secara berkala kepada Simak BMN pusat dalam hal ini Ditlog AAL sehingga pengiriman data BMN dari tiap subsatker bisa tepat waktu diterima satker pusat.
- c. BMN pasti mengalami penyusutan nilai yang berujung pada dihapuskannya BMN itu sendiri. Subsatker BMN harus melaksanakan pencatatan secara berkala tentang kondisi BMN yang ada tiap subsatker dan pengadministrasiannya yang tepat agar mempermudah dalam pelaporannya pada aplikasi Simak BMN, lalu dapat memberikan label tanda BMN pada setiap barang atau material milik negara agar mempermudah dalam pengawasannya dan pendataannya baik yang sudah lama ataupun baru. Satker perlu merencanakan dengan cermat BMN yang akan diusulkan penghapusan sehingga tidak terjadi keterlambatan dan penumpukan BMN.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan tentang optimalisasi penghapusan material pada satker Akademi TNI Angkatan Laut guna tertib pada laporan Simak BMN, peneliti memiliki beberapa kesimpulan yaitu masih adanya BMN atau material yang seharusnya dihapuskan dari daftar BMN namun masih belum dihapus, sehingga hanya akan mempersempit tata ruang yang ada dan tidak mengikuti perkembangannya zaman, masih adanya personel tiap satker yang belum mengetahui secara baik mekanisme penghapusan dengan baik, sehingga menghambat Ditlog AAL yang dalam hal ini yang akan mengajukan penghapusan ke tingkat atas, sehingga BMN yang harus dihapus jarang termonitor dengan baik dan kurangnya perencanaan dan koordinasi antara pengawak

Simak BMN dengan personel tiap satker sehingga pendataan terhadap BMN yang sudah menyusut belum termonitor dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrianti, M. K. (2019). *Prosedur Dan Persyaratan Penghapusan Barang Bergerak Milik Negara/Daerah Yang Kadaluarsa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. sriwijaya university reporty.
- Anggoro, S. (2012). *Penyempurnaan Simak BMN Melalui Model Operational Information System (OIS) Dalam Penghapusan Barang Milik Negara Pada Institut Teknologi Sepuluh November*. Skripsi thesis, Universitas Airlangga. *Operational information system*.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Etik Winarni, Y. S. (2020). *Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (Barang Milik Negara) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi*. jurnal ilmiah batang hari Jambi.
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Zadrak Romeo Kermite, S. P. (2021). *Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara Ditinjau Dari Permenkes No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Penelitian pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia*.